**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

**2.1 Kajian Pustaka**

**2.1.1 Kompetensi Auditor**

**2.1.1.1 Definisi Audit**

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo (2008:4) mendefinisikan audit sebagai berikut:

“*Auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) yang dimaksud dengan audit adalah :

suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun manajemen beserta catatan-catatatn pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Sedangkan menurut Mulyadi (2013:9) definisi *auditing* secara umum adalah:

“*Auditing* adalah suatu proses sistematik untuk memperleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengennai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antaran pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang 18 telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkempentingan.”

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan ada beberapa poin penting dalam audit yaitu:

a. Ada proses pengumpulan bukti dan pengevaluasian bukti

b. Dilakukan oleh pihak independen dan kompeten

c. Bertujuan memberikan pendapat atas kewajaran dan pelaporan keuangan suatu

organisasi atau perusahaan.

**2.1.1.2 Tujuan Audit**

Menurut William F. Messier, dan Margareth Boh. (2003) Tujuan audit secara umum dapat diklasifikasilkan sebagai berikut :

1. Kelengkapan (*Completeness).* Untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah

dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan.

2. Ketepatan (*Accurancy*). Untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang

ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar,

diklasifikasikan, dan dicatat dengan tepat.

3. Eksistensi (*Existence*). Untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban

yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu, jadi

transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif.

4. Penilaian (*Valuation*). Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang

berlaku umum telah diterapkan dengan benar.

5. Klasifikasi (*Classification*). Untuk memastikan bahwa transaksi yang

dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan

saldo maka angka-angka yang dimasukkan didaftar klien telah diklasifikasikan

dengan tepat.

6. Ketepatan (*Accurancy*). Untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada

tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angkaangka buku

besar. Serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat.

7. Pisah Batas (*Cut-Off).* Untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat

tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang mungkin sekali

salah saji adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu peride akuntansi.

8. Pengungkapan (*Disclosure)*. Untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan

persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam

laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki

laporan tersebut.

**2.1.1.3 Jenis-jenis Auditing**

Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jernis. Pembagian ini dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa jenis audit menurut ahli.

Menurut Sukrino Agoes (2012:9), ditinjau dari jenis pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas :

1. Management Audit (*Operational Audit*)

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit)*

4. Audit Komputer (*Computer Audit)*

Berikut akan dijelaskan jenis-jenis audit yang ditinjau dari jenis pemeriksaan:

1. Audit Operasional *(Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap

kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan

operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk

mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efesien, dan

ekonomis.

2. Pemeriksaan Ketaatan *(Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang

dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-

peraturan dan kebijakan- 19 kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh

pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.

3. Pemerikasaan Intern (*Internal Audit),* yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh

bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan

akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang

telah ditentukan.

4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan oleh Kantor Akuntan

Publik (KAP) terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan

menggunakan Electronic Data Processing (EDP) System.

Menurut Sukrino Agoes (2012:10), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas :

1. Pemeriksaan Umum *(General Audit)*

2. Pemeriksaan Khusus *(Special Audit)*

Berikut akan dijelaskan jenis-jenis audit yang ditinjau dari luasnya pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Umum *(General Audit*), yaitu suatu pemeriksaan umum atas

laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai

kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Pemeriksaan Khusus *(Special Audit),* yaitu suatu pemeriksaan terbatas (sesuai

dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu

memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Dari uraian di atas jenis-jenis audit dapat ditinjau dari jenis pemeriksaan serta dapat ditinjau dari luasnya pemeriksaan tergantung pada kebutuhan pengguna laporan keuangan.

Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:20), jenis audit terdiri dari tiga macam, yaitu: “ 1. Audit Laporan Keuangan *(Financial Statement Audit*) 2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*) 3. Audit Operasional (*Operational Audit)”*

1. Audit Laporan Keuangan *(Financial Statement Audit)* berkaitan dengan

kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan entitas dengan

maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan tersebut disajikan

secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip

akuntansi berlaku umum (GAAP).

2. Audit Kepatuhan *(Compliance Audit)* berkaitan dengan kegiatan memperoleh

dan memeriksa bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi

suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu.

3. Auditor Operasional *(Operational Audit)* berkaitan dengan kegiatan

memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan

operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.

Adapun menurut Arens, Elder, and Beasley (2014:32) terdapat tiga jenis audit yaitu sebagai berikut*:*

*“1. An operational audit 2. A Compliance Audit 3. A Financial Statement*

*Audit*” Berikut adalah penjelasan dari jenis audit di atas:

1. *“1. An operational audit evaluates the efficiency and effectiveness of*

*any part of an organization’s operating procedures and methods. At*

*the completion of an operational audit, management normally expects*

*recommendations for imporving operations.*

1. *A compliance audit is conducted to determine wheter the auditee is*

*following specific procedures, rules or regulation set by some higher authority.*

1. *A financial statement audit is conducted to determine wheter the financial statement (the information being verified) are state in accordance with specified criteria.”*

**2.1.1.4 Jenis-jenis Auditor**

Randal J Elder, Mark S Beasley dan Alvin A. Arens yang dialihbahasakan Amir Abdi Jusuf (2012:19) *auditor* yang paling umum terdiri dari empat jenis yaitu :

1. *Auditor* Independen (Akuntan Publik)

2. *Audito*r Pemerintah

3. *Audito*r Pajak

4. Auditor Internal (*Internal Auditor*)

Adapun penjelasan dari jenis-jenis Auditor menurut Arens et.al tersebut adalah sebagai berikut:

1. Auditor Independen (Akutan Publik) Auditor independen berasal dari kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istiah auditor dan kantor akuntan public dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal
2. Auditor Pemerintah Auditor pemerintah merupakan auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan Negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai lembaga tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah. BPK mengaudit sebagai besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserhkan kepada DPR. BPKP mengevaluasi efisensi dan efektifitas operasional berbagai program pemerintah. Sedangakan Itjen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen atau kementriannya.
3. Auditor Pajak Auditor pajak bersal dari Direktorat jendral (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor.
4. Auditor Internal (Internal Auditor) Auditor internal dipekerjakan oleh perussahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Akan tetapi, auditor intenal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubunngan antara pemberi kerjakaryawan. Para pemakai dari luar etitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diversifikasi

**2.1.2 Beban Kerja Auditor**

**2.1.2.1 Pengertian Beban Kerja**

Beban kerja *(workload)* merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan produktivitas perusahaan dan kualitas jasa yang dihasilkan oleh karena itu beban kerja harus sesuai dengan kapasitasnya dan diperhatikan oleh setiap perusahaan agar kegiatan perusahaan berjalan efektif dan efisien serta jasa yang dihasilkan berkualitas.

Menurut Permendagri No.12 tahun 2008 Beban kerja *(Workload)* adalah:

“besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi

dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.”

Lopez (2005) yang dikutip oleh Liswan (2011:3) menyatakan bahwa :

“Proses audit yang dilakukan ketika ada tekanan workload akan

menghasilkan kualitas audit yang lebih rendah dibandingkan dengan

ketika tidak ada tekanan *workload*. Dengan adanya beban kerja yang

dihadapi oleh karyawan, seorang karyawan tidak dapat melakukan

pekerjaannya dengan maksimal karena pekerjaan yang banyak tidak

didukung dengan waktu yang cukup dalam mengerjakan pekerjaan

tersebut. Sehingga auditor dalam melakukan tugasnya tidak bisa

menghasilkan kualitas audit yang baik”

Pengertian beban kerja *(Workload)* menurut L. Hardi Pranoto dan Retnowati (2015:2) adalah:

“Beban kerja adalah tindakan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah

waktu yang diperlukan karyawan untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan.”

Menurut Adil Kurnia (2010) dalam jurnalnya menyatakan pengertian beban kerja *(workload)*, yaitu :

“Beban kerja adalah suatu proses analisa terhadap waktu yang digunakan

oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menyelesaikan tugas-tugas

suatu pekerjaan (jabatan) atau kelompok jabatan (unit kerja) yang

dilaksanakan dalam keadaan atau kondisi normal.”

Sedangkan Tarwaka yang dikutip oleh Murdiyani, (2010) mengemukakan bahwa :

“setiap pekerjaan merupakan beban bagi yang bersangkutan. Beban

tersebut dapat berupa beban fisik maupun mental.”

Sementara Grounewegen yang dikutip oleh Murdiyani (2010) mendefinisikan :

“Beban kerja sebagai jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh

sekelompok atau seseorang dalam waktu tertentu. Berdasarkan definisi

diatas dapat diartikan bahwa beban kerja *(workload)* adalah keseluruhan

waktu yang digunakan oleh seseorang dalam melakukan aktivitas atau

kegiatan selama jam kerja.“

**2.1.2.2 Dimensi Beban Kerja**

Menurut Munandar (2001:381-384), mengklasifikasikan beban kerja kedalam faktor-faktor intrinsik dalam pekerjaan sebagai berikut :

1. Tuntutan Fisik. Kondisi kerja tertentu dapat menghasilkan prestasi kerja

yang optimal disamping dampaknya terhadap kinerja pegawai, kondisi fisik berdampak pula terhadap kesehatan mental seorang tenaga kerja.

1. Tuntutan tugas Kerja shif/kerja malam sering kali menyebabkan kelelahan

bagi para pegawai akibat dari beban kerja yang berlebihan. Beban kerja berlebihan dan beban kerja terlalu sedikit dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Beban kerja dapat dibedakan menjadi dua katagori yaitu :

1. Beban kerja terlalu banyak/sedikit “ Kuantitatif” yang timbul akibat dari tugas tugas yang terlalu banyak/sedikit diberikan kepada tenaga kerja untuk diselesaikan dalam waktu tertentu.
2. Beban kerja berlebihan/terlalu sedikit Kualitatif yaitu jika orang merasa

tidak mampu untuk melaksanakan suatu tugas atau melaksanakan tugas tidak menggunakan keterampilan dan atau potensi dari tenaga kerja .

Menurut *Sutherland & Cooper* dalam Munandar 2001:387 :

“Beban kerja terlalu sedikit dapat menyebabkan kurang adanya

rangsangan akan mengarah kesemangat dan motivasi yang rendah untuk

kerja, karena pegawai akan merasa bahwa dia tidak maju maju dan

merasa tidak berdaya untuk memperlihatkan bakat dan

keterampilannya”

Menurut Tarwaka (2011:131) performansi kerja manusia terdiri dari tiga dimensi ukuran beban kerja yaitu:

1. Beban waktu *(Time Load)* yang menunjukkan jumlah waktu yang tersedia

dalam perencanaaan, pelaksanaan, monitoring tugas. Beban waktu sangat dekat hubungannya dengan penggunaan waktu yang menjadi metode utama dalam mengevaluasi seseorang dalam menyelesaikan tugas tugasnya. Beban waktu tergantung pada ketersediaan waktu senggang dan tumpang tindih yang terjadi di antara tugas-tugas.

1. Beban usaha mental *(Mental Effort* ) yang berarti banyaknya usaha mental

dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Beban usaha mental adalah sebuah indikator tentang jumlah perhatian atau tuntutan mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dengan beban usaha mental yang rendah maka konsentrasi dan perhatian yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah tugas akan minimal jumlahnya dan oleh karena itu kinerja hampir menjadi sesuatu yang otomatis. Secara umum hal ini disebabkan oleh kompleksitas tugas dan jumlah informasi yang harus diproses oleh seorang operator untuk melakukan tugas tersebut dengan baik. Tuntutan yang tinggi oleh usaha mental membutuhkan perhatian atau konsentrasi total yang disebabkan oleh adanya kompleksitas tugas atau jumlah informasi yang harus diproses. Aktivitas-aktivitas seperti melakukan kalkulasi, membuat keputusan, mengingat atau menyimpan informasi dan pemecahan masalah adalah contoh- contoh usaha mental.

1. Beban tekanan psikologis (*Psylogical Stress*) yang menunjukkan tingkat

resiko pekerjaan, kebingungan dan frustasi. Beban tekanan psikologis mengacu pada kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kebingungan, frustasi yang terkait dengan kinerja tugas, sehingga membuat penyelesaian tugas menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan. Pada tekanan dengan level rendah maka seseorang akan merasa relatif rileks, begitu tekanan meningkat maka akan terjadi distraksi dan aspek-aspek yang bersangkutan yang terkait dengan tugas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang ada dalam lingkungan individu. Faktor-faktor tersebut meliputi hal-hal seperti motivasi, kelelahan, rasa takut, tingkat kemampuan, temperatur, kebisingan, vibrasi, atau ketenangan

**2.1.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Beban Kerja Auditor**

Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja *(Workload*) dalam penelitian Aminah Soleman (Jurnal Arika, 2011:85) adalah sebagai berikut :

1. Faktor eksternal:

Beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, seperti: (a). Tugas *(Task).* Meliputi tugas bersifat seperti, stasiun kerja, tata ruang tempat kerja, kondisi ruang kerja, kondisi lingkungan kerja, sikap kerja. (b). Organisasi kerja. Meliputi lamanya waktu kerja, waktu istirahat, shift kerja, sistem kerja dan sebagainya. (c). Lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini dapat memberikan beban tambahan yang meliputi, lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja miniawi, lingkungan kerja bioligis dan lingkungan kerja psikologis.

2. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh akibat dari reaksi beban kerja eksternal yang berpotensi sebagai stresor, meliputi faktor somatis (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan, dan sebagainya), dan faktor psiksi (motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan, dan sebagainya).

**2.1.2.4 Pengukuran Beban Kerja**

Pengukuran beban kerja dapat dilakukan dalam berbagai prosedur, namun O’Donnell & Eggemeier (dalam Muskamal, 2010) telah menggolongkan secara garis besar ada tiga kategori pengukuran beban kerja. Tiga kategori tersebut yaitu:

1. Pengukuran subjektif, yakni pengukuran yang didasarkan kepada penilaian dan peloporan oleh pekerja terhadap beban kerja yang dirasakannya dalam menyelesaikan suatu tugas. Pengukuran jenis ini pada umumnya menggunakan skala penilaian *(ratting scale).*
2. Pengukuran kinerja, yaitu pengukuran yang diperoleh melalui pengamatan

terhadap aspek-aspek perilaku/aktivitas yang ditampilkan oleh pekerja. Salah satu jenis dalam pengukuran kinerja adalah pengkuruan yang diukur berdasarkan waktu. Pengukuran kinerja dengan menggunakan waktu merupakan suatu metode untuk mengetahui waktu penyelesaian suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja yang memiliki kualifikasi tertentu, di dalam suasana kerja yang telah ditentukan serta dikerjakan dengan suatu tempo kerja tertentu *(Whitmore, 1987).*

1. Pengukuran fisiologis, yaitu pengukuran yang mengukur tingkat beban kerja dengan mengetahui beberapa aspek dari respon fisilogis pekerja sewaktu menyelesaikan suatu tugas/pekerja tertentu. Pengukuran yang dilakukan biasanya pada refleks pupil, pergerakan mata, aktivitas otot dan respon-respon tubuh lainnya.

**2.1.2.5 Manfaat Pengukuran Beban Kerja**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah dalam Muskamal (2010) menjelaskan bahwa dilakukannya pengukuran beban kerja memberikan beberapa manfaat kepada organisasi, yakni:

1. Penataan/ penyempurnaan struktur organisasi.

2. Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit.

3. Bahan penyempurnan sistem dan prosedur kerja.

4. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan.

5. Penyusunan standar beban kerja jabatan/ kelembagaan, penyusunan daftar

susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural.

6. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja

organisasi.

7. Program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan.

8. Program promosi pegawai.

9. Reward and punishment terhadap unit atau penjabat.

10. Bahan penyempurnaan program diklat.

11. Bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan

pendayagunaan sumber daya manusia.

12. beban kerja memberikan beberapa keuntungan bagi organisasi

**2.1.3. Due professional care**

**2.1.3.1 Definisi Due professional care**

Definisi *Due professional care* Menurut Agoes dan Hoesada (2012:22),

bahwa :

“ Yang di maksud dengan due professional care adalah: “Kemahiran

professional harus digunakan secara cermat dan seksama umunya,

kewaspadaan bernuansa kecurigaan professional yang sehat (skeptisme)

khusunya, lebih khusus lagi selalu mempertimbangkan kemungkinan

pelanggaran dan kecurangan dalam pelaporan dan laporan keuangan

untuk menyampaikan kesimpulan audit dengan keyakinan madai sesuai

kebenaran.”

Menurut Aren, et al. (2014:35) yang dimaksud dengan due professional

care adalah :

“*Due professional care it mean that auditor’s are professionals*

*responsible for fulfilling their duties diligently and carefuly. Due care*

*include consideration of the complitness of the audit documentation, the*

*suffiency of the audit evidence and the appropriateness of the audit*

*report. As professionals auditor must not act negligently or in bad faith,*

*but they are not expected to be infallible.”*

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa due professional care berkaitan dengan ketekunan dan kehati-hatian yang harus dimiliki oleh seorang auditor, ketekunan dan kehati-hatian tersebut menyangkut dalam hal pertimbangan, kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit dan 44 kesesuaian laporan audit.

Auditor diharapkan tidak melakukan kelalaian atau itikad buruk, tetapi mereka tidakdi tuntut untuk menjadi sempurna.

Menurut Timothy J.Lowers, et al. (2013:45), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *due professional care* adalah :

*“Due Care reflect a level of performance that would be exercised by*

*reasonable auditor’s in similar circumstances. This standard is often*

*referred to as that of a prudent auditor, auditor are expected to process*

*the skils and knowledge of others in their profession but are not expected*

*to be infallible. This aspect relates to the competences and capabilities of*

*the auditor to peform the engaangement and issue appropriate report.*

*One specific element of due care noted by the standars is the need for*

*auditor’s to plan and peform the audit with an appropriate level of*

*professional skepticism.”*

Dari pengertian mengenai *due professional care* yang diterngkan oleh Timothy J.Lower, et al. dapat kita pahami bahwa due professional care berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan seorang auditor di dalam melakukan jasa audit/perikatan dan di dalam mengeluarkan laporan hasil audit, salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor terkait dengan *due professional care* adalah skeptisisme professional.

Menurut Halim (2015:34), yang dimaksud dengan due professional care adalah:

“Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan

kehatihatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban

untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional pada

tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi

kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionlnya yang kompeten

berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling

muktahir.”

Dari seluruh pengertian dapat disimpulkan bahwa due professional care adalah sikap cermat, ketekunan, kehati-hatian dan seksama yang harus dimiliki 45 oleh seorang auditor di dalam setiap pemberian jasa auditnya.

“*Due professional care* dianggap hal yang cukup penting karena dari 10

kelemahan audit di SEC Amerika Serikat 1987-1997, kegagalan

menerapkan *due professional care*. Berada di posisi ke 2 (71% kasus)

dari 10 kelemahan audit SEC dan professional skepticism berada di

posisi ke 3 (60% kasus) dari 10 kelemahan audit SEC

(Tuannakota 2013:215).

Oleh karena itu kecermatan dan keseksamaan auditor yang jujur dituntut

agar aktivitas audit dan perilaku professional tidak berdampak merugikan

orang lain, kepedulian akan kerusakan masyarakat akibat kurang

cermatan audit yang diseimbangkan dengan keperluan menghindari

risiko audit itu sendiri (Agoes dan Hoesada, 2012:24).

“Kecermatan professional/*due professional care* memberi jaminan bahwa

standar profesi minimum terpenuh, menumbuhkan kejujuran

professional, kepedulian dampak sosial dan pelaporan indikasi

kecurangan secara serta-merta berdampak pada peningkatan nilai

ekonomis jasa audit dan citra profesi audit (Agoes dan Hoesada,

2012:27).”

**2.1.3.2 Tujuan Due professional care**

Auditor di harapkan memiliki kesungguhan dan kecermatan dalam melaksanakan tugas profesioanal audit serta pada saat menerbitkan laporan temuan (Badjuri,2011).

Menurut Mulyadi,2013:27 :

Penggunaan kemahiran professional auditor dengan cermat dan seksama

menghendaki diadakannya pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat

pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dan terhadap

pertimbangan 46 yang dibuat oleh siapa saja yang membantu proses

audit. Di samping itu, standar ini tidak hanya menghendaki auditor

menggunakan prosedur yang semestinya tetapi meliputi juga bagaimana

prosedur tersebut diterapkan dan dikooordinasikan.

“Kecermatan dan keseksamaan auditor yang jujur dituntut agar aktivasi

audit dan perilaku professional tidak berdampak merugikan orang lain, kepedulian akan kerusakan masyarakat akibat kekurangan kecermatan audit yang diseimbangkan dengan kepedulian menghindari risiko audit itu sendiri “

(Agoes dan Hoesada,2012:22).

Selanjutnya Agoes dan Hoesada (2012:27) menegaskan bahwa:

“kecermatan professional memberi jaminan bahwa standar profesi

minimum terpenuhi, menumbuhkan kejujuran professional, kepedulian

dampak sosial dan pelaporan indikasi kecurangan secara serta-merta

berdampak pada peningkatan nilai eknomis jasa audit dan citra profesi

audit. “

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *due professional care* (penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama) yaitu dimulai dengan menghendaki diadakannya pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat pengawasan atau pemeriksaan yang kemudian mendapatkan keyakinan atau jaminan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji apapun.

**2.1.3.3 Karaketrisktik Due professional care**

Menurut Theodorus M. Tuanakotta,2011:64 :

*“Due professional care* memiliki arti kemahiran professional yang

cermat dan seksama. Due audit care berarti due care dalam audit. Due

audit care atau kehati-hatian dalam melaksanakan suatu audit ada

ukurannya, yakni kode etik dan standar audit.“

Menurut Agoes dan Hoesada (2012:22) terdapat dua karakteristik dalam due professional care yang harus di perhatikan oleh setiap auditor, diantarannya:

1. Skeptisme professional

2. Keyakinan yang memadai.

Adapun penjelasan mengenai karakteristik due profesonal care yang harus diperhatikan auditor adalah sebagai berikut:

1. Skeptisme professional Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama menurut auditor untuk melaksanakan skeptisme professional. Skeptisme professional adalah sikap yang mencangkup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemapuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif (SPAP,2011:230.2).

Oleh karena itu, skeptisme professional merupakan sikap mutlak yang

harus dimiliki auditor. Indikator untuk mengukur skeptisme professional

auditor adalah sebagai berikut:

- Adanya penilaian yang krtis, tidak menerima begitu saja.

- Berfikir terus-menerus, bertanya dan mempertanyakan.

- Membuktikan kesahihan dari bukti audit yang diperoleh.

- Waspada terhadap bukti audit yang kontradiktif.

- Mempertanyakan keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain.

Theodorus M. Tuanakotta (2011:77) menegaskan bahwa:

“Salah satu penyebab dari suatu gagal audit *(audit failure)* adalah

rendahnya skeptisme professional. Skeptisme professional yang rendah

mengumpulkan kepekaan auditor terhadap kekurangan baik yang nyata

maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya yang

mengindikasikan adanya kesalahan *(accounting error)* dan kecurangan

(fraud).”

Selajutnya dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:230.2) dijelaskan bahwa :

“Auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun

juga tidak menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan

lagi. Dalam menggunakan skeptisme professional, auditor tidak harus

puas dengan bakti yang kurang *persuasive* karena keyakinan bahwa

manajemen adalah jujur.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa skeptisme professional merupakan salah satu sikap yang mutlak harus dimiliki auditor terutama dalam hal penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama *(due professional care).*

Keyakinan yang memadai Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keayakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Keyakinan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan tersebut.

Oleh karena itu, suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material (SPAP,2011:230.2).

Indikator untuk mengukur keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material menurut Agoes dan Hoesada (2012:32) adalah sebagai berikut:

- Mempunyai sikap dapat dipercaya dalam mengaudit laporan keuangan.

- Mempunyai kompetensi dalam mengaudit laporan keungan.

- Mempunyai sikap kehati-hatian dalam mengaudit laporan keuangan.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:230.2) dijelaskan lebih lanjut bahwa :

“Pendapat auditor atas laporan keuangan didasarkan pada konsep

perolehan keyakinan memadai. Oleh karena itu, penemuan kemudian

salah saji material yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan

yang ada dalam laporan keuangan, tidak berarti bahwa dengan sendirinya

merupakan bukti kegagalan untuk memperoleh keyakinan yang

memadai, tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan atau

pertimbangan dan tidak menggunakan professional dengan cermat dan

seksama, atau kegagalan untuk memenuhi standar auditing yang

ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Kecermatan professional

merupakan sikap batin pribadi, berasal dari kesadaran diri, bermuara

pada institusi kewaspadaan, kehati-hatian dan kepedulian, karena itu

tidak dapat dipaksakan dan diinstruksikan.”

**2.1.4 Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan**

**2.1.4.1 Pengertian Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan**

Definisi Kecurangan *(Fraud)* Menurut Alvin. A. Arens dkk (2012) menyatakan bahwa “kecurangan terjadi ketika salah saji dibuat dalam suatu keadaaan yang mengetahui bahwa hal itu adalah kepalsuan dan dilakukan dengan maksud untuk melakukan kecurangan.”

Sedangkan kecurangan sebagaimana yang didefinikan oleh AICPA (AU 316) yang dikutip oleh Karyono (2013) adalah: *“Fraud is an intentional act that results in a material misstatement in financial statements that are the subject of an audit”.*

Definisi yang dikemukakan AICPA di atas dalam terjemahan bahwa kecurangan yaitu:

“Kecurangan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan

mengakibatkan adanya salah saji material dalam laporan keuangan

dimana laporan keuangan ini adalah subjek utama dalam audit”.

Berdasarkan definisi tersebut, fraud dapat diindetifikasikan sebagai

kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan

melanggar hukum (illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk

tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru

*(mislead*) kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik

dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk

mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang

memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung

maupun tidak langsung merugikan orang lain.

**2.1.4.2 Unsur-unsur Kecurangan (Fraud)**

Fraud yang terjadi pada perusahaan atau korporasi dipengaruhi oleh unsur-unsur pendukung terjadinya fraud.

Viraguna Bagoes Oka (2004:3) menyatakan bahwa: Unsur-unsur fraud adalah sebagai berikut:

1. Harus terdapat salah pernyataan *(misrepresentation)* dari suatu masa lampau *(past)* atau sekarang *(present)*
2. Fakta bersifat material *(material fact)*
3. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan *(make knowingly or recklessly)*
4. Dengan maksud *(intent)* untuk menyebabkan suatu pihak beraksi
5. Pihak yang dirugikan harus beraksi *(acted)* terhadap salah pernyataan tersebut (misrepresentation) yang merugikan (detriment)”.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi unsurunsur fraud adalah harus mencakup adanya salah pernyataan dari suatu masa lampau atau sekarang mengenai fakta material, yang dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan dengan maksud untuk mencari keuntungan yang menyebabkan orang lain dirugikan.

**2.1.4.3 Klasifikasi Kecurangan (Fraud)**

Kecurangan dapat juga diklasifikasikan menurut pelaku kecurangannya yaitu kecurangan dari dalam organisasi (i*ntern*), dari luar organisasi *(ekstern),* dan melibatkan orang dalam dan luar organisasi (kolusi).

Kecurangan oleh pelaku intern organisasi terdiri atas kecurangan manajemen dan kecurangan karyawan. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2010:4)*

1. *Management Fraud* (Fraud oleh Manajemen). Management fraud umumnya sulit untuk ditemukan sebab seseorang atau lebih anggota manajemen bisa saja mengesampingkan internal controls Bentuk-bentuk management fraud antara lain ialah menghapuskan transaksi tertentu, kecurangan dalam mencantumkan atau melaporkan jumlah tertentu, dan lain sebagainya. Ada dua hal yang termasuk di dalam kecurangan oleh pihak manajemen (management fraud), yaitu:
2. Manajemen meminta agar KAP memberikan opini setuju *(unqualified*

*opinion)* padahal manajemen tahu sebetulnya Laporan Keuangannya tidak layak.

1. Manajemen melakukan transaksi-transaksi dengan pihak yang masih

ada hubungan kekeluargaan atau persahabatan *(related party transaction),* atau juga melakukan transaksi yang tidak wajar *(notatarm’s lenght)*, kesemuanya itu merugikan perusahaan dan menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompoknya

1. *Employee Fraud* (Fraud oleh Karyawan) Jika auditor bertanggung

jawab menemukan semua employee fraud, maka audit tests harus diperluas sebab banyak sekali jenisjenis kecurangan karyawan yang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin terdeteksi. Maka, prosedur auditnya akan lebih mahal dibanding dengan temuannya ini dikarenakan adanya tindakan kolusi antara beberapa karyawan dalam memalsukan dokumen dan akan sulit sekali ditemukan dengan cara audit yang biasa.

1. Kecurangan dari Pihak Luar Organisasi *(Ekstern)* Kecurangan dari

pihak luar organisasi antara lain dilakukan oleh pemasok, levensir dan oleh kontraktor, dengan cara:

1. Pengiriman barang yang lebih sedikit, dan penggantian barang dengan

kualitas rendah.

b. Penyerahan pekerjaan dengan kualitas yang rendah.

c. Penagihan ganda atau penagihan lebih besar dari prestasi yang diberikan.

**2.1.4.4 Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Kecurangan**

Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan dan dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Faktor pendorong kecurangan boleh diartikan sebagai pola pemanfaatan “kesempatan/peluang” untuk mengambil keuntungan melalui cara-cara yang merugikan.

Teori yang dikemukakan oleh Jack Balogna terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindak kecurangan yang dikenal teori *GONE (Gone Theory),* yaitu:

1. *Greed* (keserakahan) berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada

dalam diri setiap orang.

1. *Opportunity* (kesempatan) berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi,

masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.

1. *Need* (kebutuhan) berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh

individu untuk menunjang hidupnya secara wajar.

1. *Exposure* (pengungkapan) berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkap/ditemukan, semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut.

*Greed dan need* termasuk dalam faktor individu yang merupakan hal bersifat sangat personal dan diluar kendali perusahaan sehingga sulit sekali dapat dihilangkan oleh ketentuan perundang-undangan. Opportunity dan Exposure disebut sebagai faktor genetik karena merupakan faktor yang masih di dalam kendali Perusahaan sebagai korban perbuatan kecurangan. Pada umumnya terdapatnya kesempatan akan mendorong seseorang untuk berbuat fraud kerena pelaku cenderung berpikir bahwa kapan lagi ada kesempatan jika tidak sekarang.

Sementara exposure berkaitan dengan proses pembelajaran berbuat curang karena menganggap sanksi terhadap pelaku kecurangan tergolong ringan sehingga para karyawan Perusahaan tidak merasa takut apabila melakukan kecurangan.

**2.1.4.5 Penyebab Kecurangan (Fraud)**

Segitiga kecurangan *(fraud triangle theory)* menjelaskan bahwa tindakan kecurangan dapat terjadi karena adanya tiga unsur yaitu kesempatan, tekanan, dan pembenaran (Arens, 2005:432).

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. Ada tiga elemen yang mendorong terjadinya kecurangan yaitu :

“Tekanan yang dirasakan, peluang/kesempatan yang dimiliki, dan kemampuan untuk merasionalisasi sebagai sesuatu yang dapat diterima

Menurut (Zimbelman et al, 2014:43).

1. Kesempatan *(opportunity)* Faktor kesempatan merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan *(fraud)*. Risiko adanya kesempatan bagi pegawai untuk dapat melakukan tindak kecurangan dapat diperkecil dengan adanya pengendalian internal (internal control) yang memadai dan terus melakukan pengawasan atas pengendalian internal tersebut.
2. Tekanan situasional/motivasi *(situational pressure/motivation*) Motivasi

merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam hal terjadinya kecurangan, yang termasuk dalam kategori ini dapat berupa kebutuhan finansial, tantangan untuk dapat melakukan kecurangan tanpa terdeteksi atau tindakan balas dendam atas perlakuan perusahaan yang dinilai tidak adil.

1. Rasionalisasi *(ratinalization)* Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada di dalam lingkungan yang cukup menekan membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur. Pressure Rationalization Opportunity

**2.1.4.6 Bentuk-bentuk Kecurangan (Fraud)**

Menurut Examination Manual 2006 dari *Association of Certified Fraud Examiner,* fraud (kecurangan) dalam Karyono (2013) terdiri dari beberapa tipe audit :

1. Fraudulent Financial Reporting (Laporan Keuangan yang curang). Pelaporan keuangan yang curang adalah pernyataan kesalahan atau kesalahan dari jumlah atau penyingkapan dengan tujuan untuk menipu para pemakai. Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh penjabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan *(financial engineering)* dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing.
2. Misaproppriation of Asset (Penggelapan Harta) Penggelapan harta adalah

penipuan yang melibatkan pencurian dari suatu kesatuan asset. *Misapropriation of Asset* digunakan untuk mengacu pada pencurian yang melibatkan para karyawan dan anggota internal dari organisasi. Penggelapan asset biasanya dilakukan di tingkat yang lebih rendah dari hirarki organisasi. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung *(defined value).*

1. Korupsi Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, dimana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisma). Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan *(conflict of interest),* penyuapan *(bribery),* penerimaan yang tidak sah/illegal *(illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi *(economic extortion)*.
2. Kecurangan yang Berkaitan dengan Komputer Kecurangan yang berkaitan

dengan komputer (computer fraud) menurut *Stanford Research Internasional* yang diungkap oleh G. Jack Balogna dalam bukunya *Forensic Accounting* diungkap mulai tahun 1958, kejahatan waktu dikelompokkan dalam perusakan computer, pencurian informasi dan harta kekayaan, kecurangan keuangan atau pencurian kas dan penggunaan atau penjualan jasa computer secara tidak sah.

**2.1.4.7 Kemampuan Mendeteksi Kecurangan**

Fraud dapat dideteksi bukan hanya melalui proses audit oleh akuntan publik saja tetapi secara lebih komprehensif melalui *fraud deterrence cycle* yang melibatkan manajemen, internal auditor, auditor eksternal dan auditor forensik.

Analisis atas *corporate reporting value chain* mendukung pandangan bahwa auditor hanyalah salah satu bagian dalam mata rantai pelaporan perusahaan (termasuk pelaporan keuangan) dan pencegahan dan pendeteksian fraud akan membutuhkan kerja sama dari para partisipan atau bagian-bagian lain dari mata rantai ini.

Deteksi fraud adalah suatu tindakan untuk mengetahui bahwa fraud terjadi, siapa pelakunya, siapa korbannya dan apa penyebabnya. Kunci pada pendeteksian fraud adalah untuk dapat melihat adanya kesalahan dan ketidakberesan. Penelitian ini menyatakan bahwa kemampuan mendeteksi kecurangan berarti proses menemukan atau menentukan suatu tindakan ilegal yang dapat mengakibatkan salah saji dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan adalah dengan melihat tanda, sinyal, atau red flags suatu tindakan yang diduga menyebabkan atau potensial menimbulkan kecurangan.

Secara garis besar, tanda-tanda yang digunakan untuk mengindikasikan kecurangan dibagi menjadi dua yaitu tanda-tanda kecurangan yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Tanda-tanda yang berasal dari dalam perusahaan meliputi enyimpangan pemakaian produksi yang ditunjukkan oleh beberapa laporan produksi yang telah diubah.

Menurut Marcellina dan Sugeng, 2009 :

“Sedangkan tanda-tanda kecurangan yang berasal dari luar perusahaan

meliputi kelebihan pembebanan jasa dan bahan, tagihan yang salah

dikirimkan ke perusahaan yang salah akibat pemalsuan faktur,

kekurangan bukti pendukung 57 untuk suatu pembayaran barang dan

jasa, dan lainnya.”

Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) No 01 Tahun 2007 bagian Pemeriksaan dengan tujuan tertentu No 06 menyatakan :

“seorang *auditor* dituntut untuk merancang pemeriksaan untuk mendeteksi

terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecurangan *(fraud)*, serta ketidakpatutan *(abuse)”.*

Standar-standar tersebut menjelaskan begitu besar tanggung jawab auditor dalam menemukan suatu kecurangan atau fraud, tetapi hal ini begitu bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, berbagai kasus kegagalan dan ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi adanya tindak kecurangan membuktikan bahwa masih lemahnya kepatuhan auditor terhadap standar yang telah ditetapkan.

*(Crumbley*, dkk. 2005) menyatakan bahwa :

“Seorang auditor baik internal maupun eksternal harus memiliki

kemampuan untuk mendeteksi fraud yang dapat timbul. “

Koroy (2009) menyatakan bahwa :

“Pendeteksian kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah

dilaksanakan oleh auditor. Untuk mendukung kemampuan auditor

mendeteksi kecurangan yang dapat terjadi dalam auditnya, auditor perlu

untuk mengerti dan memahami kecurangan, jenis, karakteristiknya, serta

cara untuk mendeteksinya. Salah satu elemen paling penting dalam

mendeteksi kecurangan adalah kemampuan untuk mengenal dan

mengidentifikasi secara cepat potensi dan penyebab terjadinya kecurangan.”

Berikut adalah upaya auditor untuk dapat mampu mendeteksi kecurangan:

1. Pengendalian intern

Kemampuan Memahami sistem pengendalian internal (SPI) Sebelum melaksanakan audit, auditor harus memahami struktur pengendalian internal perusahaan klien. Dan *auditor* diharapkan mampu melaksanakan pengujian secara acak dan mendadak.

2. Kemampuan Memahami karakteristik terjadinya kecurangan

Kemampuan Memahami karakteristik terjadinya kecurangan (fraud) Kecurangan *(fraud)* selalu berkaitan dengan penyembunyian bukti atas kecurangan tersebut yang dapat berupa catatan akuntansi atau dokumen.

Johnson et al (1991) menyatakan bahwa manajer dapat melakukan tiga cara untuk menipu auditor, yakni :

1. Membuat deskripsi menyesatkan seperti mengatakan bahwa perusahaan

menurut sebagi akibat proses pertum berekspektasi yang salah sehingga auditor gagal dalam menilai dan mengenali ketidakkonsistenan yang terjadi.

1. Menciptakan suatu bingkai *(frame)* terhadap ketidakberesan yang terjadi

sehingga menimbulkan hipotesis bahwa tidak ada ketidakberesan atau ketidakwajaran terkait dengan evaluasi atas ketidakberesan yang terdeteksi.

1. Menyembunyikan ketidakwajaran dengan cara membuat berbagai manipulasi

kecil atas akun-akun tertentu dalam laporan keuangan sehingga membentuk rasionalisasi atas jumlah saldo dalam laporan keuangan tersebut.

1. Kemampuan Memahami standar pengauditan mengenai pendeteksian

kecurangan

Kemampuan Memahami standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan Salah satu permasalahan dalam pendeteksian kecurangan yaitu terkait tidak memadainya standar yang berlaku dalam memberikan arahan yang tepat. Hal ini terlihat pada perkembangan standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan yang terus-menerus mengalami perubahan. Perbaikan tersebut muncul karena adanya kenyataan bahwa tanggung jawab dalam pendeteksian kecurangan pada prakteknya belum dilaksanakan secara efektif.

Terdapat perubahan Statement on Auditing Standard (SAS) No.53 menjadi SAS No.82 dan kemudian menjadi SAS No.99. Perubahan SAS No.53 menjadi SAS No.82 karena memiliki kelemahan yaitu tidak memberikan perbedaan spesifik antara kekeliruan dan ketidakberesan. Sehingga SAS No.82 muncul untuk 60 mengatasi kelemahan SAS No.53.

SAS ini menganggap bahwa auditor memiliki upaya lebih untuk mendeteksi kecurangan yaitu auditor diharuskan untuk dapat melihat isyarat kecurangan dan melakukan perencanaan audit atas risiko kecurangan. Kelemahan standar ini yakni para auditor masih menggunakan prosedur yang sama sehingga dianggap masih kurang efektif dalam mendeteksi kecurangan. Kemudian muncul SAS No.99 yang dirancang untuk memperluas prosedur audit berkenaan dengan kecurangan pada laporan keuangan. SAS ini menekankan bahwa auditor harus mengesampingkan hubungan masa lalu dan tidak beranggapan bahwa klien jujur.

4. Kemampuan Memahami metode dan prosedur audit yang efektif dalam pendeteksian kecurangan.

Kemampuan Memahami metode dan prosedur audit yang efektif dalam pendeteksi kecurangan Prosedur dan teknik audit secara tradisional belum memberikan keyakinan dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian Johnson et al (1991) menunjukkan bahwa :

“fault model lebih efektif mendeteksi kecurangan dibandingkan dengan

*functional* model. Fault model lebih memperhatikan pada hal-hal yang

mengandung kesalahan. Model ini diperoleh melalui pengalaman

penemuan adanya kekeliruan atau kecurangan material atas penugasan

yang diterima, atau pengalaman di bidang industri tertentu.”

Fault model memfokuskan pada manipulasi yang terjadi, sehingga auditor dapat menerapkan sikap skeptisismenya. Sedangkan functional model diterapkan pada metode dan prosedur audit tradisional yang memberikan ekspektasi atas hubungan antar akun-akun, seperti penjualan dan marjin laba.

5. Kemampuan Memahami bentuk kecurangan.

Kemampuan Memahami bentuk kecurangan Memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan, dan dapat memperkirakan bentuk-bentuk kecurangan apa saja yang bisa terjadi dan auditor harus dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat melakukan kecurangan.

6. Kemampuan Melaksanakan uji dokumentasi dan personal

Kemampuan Melaksanakan uji dokumentasi dan personal Auditor harus melakukan pengujian atas dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang diperoleh. Kondisi mental dan pengawasan kerja mempengaruhi kualitas audit dalam mendeteksi kecurangan Tujuan auditor bukan hanya sebatas untuk menentukan ada atau tidak terhadap salah saji materil dalam laporan keuangan. Tetapi tujuan auditor yaitu untuk merencanakan serta melaksanakan kegiatan audit berdasarkan peraturan yang berlaku untuk memperoleh bukti audit yang memadai.

Sehingga dapat digunakan untuk menilai serta mengevaluasi apakah laporan keuangan klien (auditee) terbebas dari segala bentuk salah saji materil tanpa memperdulikan penyebab salah saji tersebut karena dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja.

**2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi auditor dalam mendeteksi kecurangan. Variabel-variabel tersebut adalah pengaruh beban kerja *(workload) dan Due professional* care terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh *workload dan due professional care* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan diantaranya dikutip dari berbagai sumber yang relavan dengan topik penelitian. Penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Peneliti dan Tahun** | **Judul penelitian** | **Perbedaan** | **Persamaan** | **Hasil penelitian** |
| 1. | Haura Faradina (2016) | Pengaruh beban kerja, pengalaman audit dan tipe kepribadian terhadap skeptisme professional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan | Variabel bebas :  Pengalaman audit dan tipe kepribadian.  Lokasi penelitian KAP Kota Bandung. | Variabel bebas:  Beban Kerja *(Workload)*  Variabel Terikat :  Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. | Beban kerja *(Workload)* yang lebih tinggi kurang skeptis dan tidak akan meningkatkan kemampuan pendeteksiannya. Auditor dengan lebih banyak pengalaman lebih skeptis dan akan meningkatkan kemampuan pendeteksiannya. Auditor dengan skeptisisme yang lebih tinggi akan meningkatkan kemampuan pendeteksiannya Penelitian ini juga menunjukkan bahwa auditor dengan tipe kepribadian ST *(SensingThinking)* dan NT *(Intuitive-Thinking)* lebih skeptis daripada tipe lain tetapi tidak memiliki perbedaan meningkatkan kemampuan pendeteksiannya. |
| 2. | Novita Ulfa (2015) | Pengaruh pengalaman, beban kerja dan pelatihan terhadap skeptisisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan | Variabel bebas :  Pengalaman dan pelatihan.  Lokasi penelitian KAP Kota Bandung | Variabel bebas:  Beban Kerja *(Workload)*  Variabel Terikat :  Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan | Pelatihan akan meningkatkan kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan, namun tidak ditemukan pengaruh antara pengalaman dan beban kerja terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa pengalaman, beban kerja, dan pelatihan mempengaruhi skeptisisme profesional auditor |
| 3. | Hafifah Nasution dan Fitriany (2012) | Pengaruh beban kerja, pengalaman audit dan tipe kepribadian terhadap skeptisisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan | Variabel bebas :  Pengalaman audit dan tipe kepribadian.  Variabel terikat :  Skeptisme Profesional.  Lokasi penelitian KAP Kota Bandung. | Variabel bebas:  Beban Kerja *(Workload)*  Variabel Terikat :  Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan | Workload tidak berpengaruh terhadap skeptisisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan pengalaman audit dan tipe kepribadian berpengaruh terhadap skeptisisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. |
| 4. | Silva Sheila  (2018) | Pengaruh skeptisisme profesional dan independensi auditor terhadap upaya pendeteksian kecurangan | Variabel bebas :  Skeptisme Professional dan Independensi  .  Lokasi penelitian KAP Kota Bandung. | Variabel Terikat :  Upaya dalam mendeteksi kecurangan | Hasil penelitian menunjukan indepndensi sangat berpengaruh pada kemampuan auditor mendeteksi kecurangan namun skeptisme tidak terlalu berpengaruh |
| 5. | Nina Griyantini Rahayu,  (2015) | Pengaruh kompetensi auditor dan skeptisisme profesional auditor terhadap upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan | Variabel bebas :  Skeptisme Professional dan Kompetensi Auditor  .  Kantor Akuntan Publik Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bandung) | Variabel Terikat :  Upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan | Hasil penelitian menunjukan Kompetensi auditor sangat berpengaruh pada kemampuan auditor mendeteksi kecurangan karena itu hal yang menunjang karena berbicara tentang mampu atau tidak. namun skeptisme tidak terlalu berpengaruh |
| 6. | Diky nurjaiman sukarsah,   (2016) | Pengaruh pengendalian internal dan profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan fraud persediaan | Variabel bebas :  Pengendalian Internal dan Profesionalisme auditor  .  Survey Pada Dua BUMN di Kota Bandung | Variabel Terikat :  Pencegahan Fraud | Hasil penelitian menunjukan ipengendalian internal dan professionalism auditor sangat berpengaruh pada kemampuan auditor mendeteksi kecurangan karena ada upaya control dan sikap professional |
| 7. | Euis sawitri  (2018) | Pengaruh beban kerja, pengalaman audit dan tipe kepribadian terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan | Variabel bebas :  Pengalaman Audit dan tipe kepribadian.  .  Lokasi penelitian 9 KAP Kota Bandung. | Variabel bebas:  Beban Kerja *(Workload)*  Variabel Terikat :  Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan | Workload tidak berpengaruh terhadap tipe kepribadian dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan penglaman dan tipe kepribadian berpengaruh terhadap skeptisisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. |
| 8. | Annisa Dila Meilasari  (2018) | Pengaruh skeptisisme profesional dan independensi auditor terhadap upaya pendeteksian kecurangan | Variabel bebas :  Skeptisme Professional dan Independensi | Variabel Terikat :  Upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan | Hasil penelitian menunjukan indepndensi sangat berpengaruh pada kemampuan auditor mendeteksi kecurangan namun skeptisme tidak terlalu berpengaruh |
| 9. | Adhynda Puspita Ayu Putri Sudrajat  (2018) | Pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan fraud | Variabel bebas :  Professionalisme (Survey pada PT Telkom Tbk di Kota Bandung) | Variabel Terikat :  Pencegahan Fraud | Hasil penelitian menunjukan professionalisme sangat berpengaruh pada kemampuan auditor mendeteksi kecurangan |
| 10. | Angga Saputra  (2019) | Pengaruh budaya organisasi dan peran auditor internal terhadap pengendalian internal dan dampaknya terhadap efektivitas pencegahan kecurangan | Variabel bebas :  Budaya organisasi dan peran auditor  Survey pada BUMN Sektor Industri Pengolahan Di Kota Bandung) | Variabel Terikat :  Pencegahan Kecurangan | Hasil penelitian menunjukan peran auditor sangat berpengaruh pada evektivitas pencegahan kecurangan namun pengaruh budaya organisasi tidak |

**2.3 Kerangka Pemikiran**

**2.3.1 Pengaruh workload terhadap kemampuan auditor dalam**

**mendeteksi kecurangan**

Workload merupakan banyaknya jumlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu, dan berkaitan dengan *Theory of Planned Behavior* dimana beban kerja akan mempengaruhi sikap dan kemampuan auditor untuk mendeteksi fraud, ketika beban kerja *auditor* tinggi dan banyak tugas-tugas yang harus diselesaikannya mengakibatkan auditor tidak maksimal dalam melakukan pemeriksaan.

Setiawan dan Fitriany (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa :

“ Tingginya beban kerja *(Workload)* akan menyebabkan kelelahan dan

dysfuncional behavior sehingga dapat menurunkan kemampuan auditor

untuk menemukan kesalahan atau melaporkan penyimpangan. Tetapi jika

beban kerja auditor tersebut rendah, auditor akan memiliki lebih banyak

waktu untuk mengevaluasi bukti yang ditemukan, sehingga auditor

semakin bisa meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi

kecurangan.”

Murtisari dan Ghozali (2006) menemukan bahwa :

“Beratnya beban pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pekerjaan akan

menurunkan kepuasan kerja dan kinerja auditor dalam mendeteksi

kecurangan”

Menurut Nasution (2012) :

“Kelebihan pekerjaan pada saat b u s y s e a s o n akan mengakibatkan

kelelahan dan ketatnya time budget bagi auditor sehingga akan

menyebabkan rendahnya kinerja auditor “

William C Boynton (2006) mengemukakan bahwa :

”Terdapat 3 (tiga) faktor pendorong terjadinya fraud, yang lebih dikenal

dengan fraud triangle yaitu opportunity, pressure dan rationalization.”

Lopez dan Peters (2012:162) menyatakan bahwa :

”Proses audit yang dilakukan dalam kondisi adanya tekanan workload akan

menghasilkan kualitas audit yang rendah dibandingkan dengan tidak

adanya tekanan beban kerja. Tentu rendah pula dalam upaya mencari

bukti bukti audit”

**2.3.2 Pengaruh due professional care terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan**

*Due professional care* merupakan hal yang penting yang harus diterapkan setiap akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar dicapai kualitas audit yang memadai.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010: 42) menyatakan bahwa :

“Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama

memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa

laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kekeliruan

atau kecurangan”.

Penelitian Frederick Gallagos and Anna Carlin (2004) tentang *Best Practice in Due Professional Care:*

*“An IT Audit Perspective* memberikan hasil bahwa *Due professional care serves as a foundation to ensure that the client a high quality review, in the post Sarbanes-Oxley, their practice of due professional care is critical in establishing public confidence in business*.”

Hal ini mengartikan bahwa due professional care yang dimiliki oleh seorang auditor maka akan meningkatkan kemampuan mendeteksi kecurangan.

Fullerton dan Durtschi (2004) menyebutkan bahwa :

“Auditor memerlukan kemahiran profesional agar dapat mendeteksi

kecurangan. Karena ketika kemahiran profesional auditor rendah, auditor

cenderung untuk mengabaikan gejala-gejala kecurangan.”

Anggriawan (2014) menyebutkan :

“Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam

mendeteksi kecurangan yaitu skeptisisme profesional. Semakin skeptis

seorang auditor maka auditor akan lebih berhati-hati dalam membuat

keputusan dengan cara mencari bukti atau informasi tambahan untuk

mendukung kesimpulannya.

**2.3.3 Landasan Teori**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Landasan Teori** | | |
| **Workload**   1. Lopez (2005) yang dikutip oleh Liswan (2011:3) 2. L. Hardi Pranoto dan Retnowati (2015:2) 3. Permendagri No.12 tahun 2008 4. Adil Kurnia (2010) 5. Tarwaka yang dikutip oleh Murdiyani, (2010) 6. Grounewegen yang dikutip oleh Murdiyani (2010) 7. Munandar (2001:381-384) 8. Aminah Soleman (Jurnal Arika, 2011:85) 9. O’Donnell & Eggemeier (dalam Muskamal, 2010) | **Due Professional Care**   1. Agoes dan Hoesada (2012:22) 2. Arens, et al. (2014:35) 3. Timothy J.Lowers, et al. (2013:45) 4. Halim (2015:34) 5. Tuannakota 2013:215 6. Theodorus M. Tuanakotta,2011:64 7. Theodorus M. Tuanakotta (2011:77) | **Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan**   1. Alvin. A. Arens dkk (2012) 2. AICPA (AU 316) yang dikutip oleh Karyono (2013) 3. S Viraguna Bagoes Oka (2004:3) 4. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2010:4)* 5. Arens, 2005:432 6. Zimbelman et al, 2014:43 7. Examination Manual 2006 dari *Association of Certified Fraud Examiner* 8. Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) No 01 Tahun 2007 9. *Crumbley*, dkk. 2005 10. Koroy (2009) |

Data Penelitian

1. Data dari 9 KAP di Bandung
2. Kuesioner : sebanyak 41 Pernyataan
3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Referensi

1. Haura Faradina (2016)
2. Ar Novita Ulfa (2015)
3. Hafifah Nasution dan Fitriany (2012)
4. Euis Sawitri (2018)

Referensi

1. Setiawan dan Fitriany (2011)
2. Murtisari dan Ghozali (2006)
3. William C Boynton (2006)
4. Lopez dan Peters (2012:162)
5. Nasution (2012)
6. William C Boynton (2006)

Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Workload

Hipotesis 1

Referensi

1. Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010: 42)

2. Frederick Gallagos and Anna Carlin (2004)

3. Fullerton dan Durtschi (2004)

4. Anggriawan (2014)

5. Fullerton dan Durtschi (2004)

Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Due Professional Care

Hipotesis 2

1. Analisis Deskriptip

* Mean

1. Analisis Verifikatif

* Uji Asumsi Klasik
* Analisis Korelasi Berganda
* Analisis Regresi Linier Berganda

1. Uji Hipotesis

* Pengujian secara Parsial (Uji t)
* Pengujian secara Simultan (Uji F)

Referensi :

1. Sugiyono (2015:5)
2. Sugiyono (2016:80)
3. Sugiyono (2016:121)
4. Sugiyono (2016:193)

Analisis Data

**2.3.4 Paradigma Pen**

Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

**2.3.4 Paradigma Penelitian**

Kemampuan mendeteeksi kecurangan

Dimensi :

1. Kemampuan Memahami sistem pengendalian internal (SPI) Dan Melaksankan Pengujian pengendalian intern
2. Kemampuan Memahami karakteristik kecurangan
3. Kemampuan Memahami Standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan
4. Kemampuan Memahami penggunaan metode dan prosedur audit yang efektif dalam pendeteksian kecurangan
5. Kemampuan Memahami faktor-faktor dan bentuk Kecurangan
6. Kemampuan Melaksanakan Uji dokumentasi dan personal

Koroy (2009)

Workload

Dimensi :

1. Beban waktu (Time Load)
2. Beban usaha mental (Mental Effort)
3. Beban tekanan psikologis (Psylogical Stress)

Tarwaka (2011:131)

Due Professional Care

Dimensi:

1. Skeptisisme professional
2. Keyakinan yang memadai

Agoes dan Hoesada (2012:22)

**Gambar 2.2**

**Paradigma penelitian**

**2.4 Hipotesis Penelitian**

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2015:93) adalah:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk

kalimat pertanyaan. Dikatakann sementara, karena jawaban yang

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan

pada faktafakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi,

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap

rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.”

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut. Maka hipotesis dari penelitian dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis 1 : Terdapat Pengaruh *workload* terhadap kemampuan mendeteksi

Kecurangan.

Hipotesis 2 : Terdapat Pengaruh *Due professional care* Terhadap kemampuan

mendeteksi kecurangan.

Hipotesis 3 : Terdapat Pengaruh *workload dan Due professional care* Terhadap

kemampuan mendeteksi kecurangan.